



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : DEPARTEMEN KOMUNIKASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERWIN HARYONO
2. Jabatan : KEPALA DEPARTEMEN
3. NHK : 253560

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 610 m2/200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/120 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 390 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.980.000.000

1. MOBIL, HYUNDAI SANTA FE JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. MOBIL, MARCEDES BENZ CLS 400 AT (C218) Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
5. MOTOR, HONDA CMX500AH IN MT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 505.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.306.736.216

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 12.091.736.216



III. HUTANG

Rp. 650.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 11.441.736.216

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.